



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Risya Aquarta Rompas

2012310118

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN -PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Risya Aquarta Rompas

2012310118

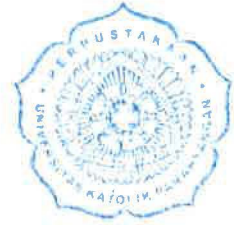
Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

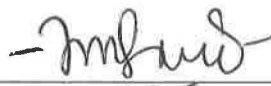
Nama : Risyah Aquarta Rompas
Nomor Pokok : 2012310118
Judul : Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Indraswari

: 

Sekretaris

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si


: 

Anggota

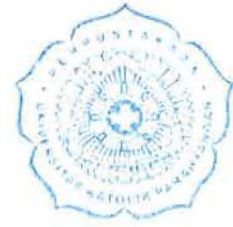
Tutik Rachmawati, S.IP., M.A., Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo

PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RisyA Aquarta Rompas

NPM : 2012310118

Program Studi : Administrasi Publik

Title : Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 18 Januari 2017



RisyA Aquarta Rompas

ABSTRAK

Nama : Risyia Aquarta Rompas
NPM : 2012310118
Judul : Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung

Di Kota Bandung, peraturan mengenai kesejahteraan sosial dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan serangkaian kegiatan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Masih ditemui sejumlah hambatan yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung Di Dinas Sosial Kota Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan daya dukung sumberdaya ditinjau dari aspek staff, wewenang, informasi, dan fasilitas terhadap Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung . Penelitian ini perlu dilakukan melihat fakta di lapangan bahwa sumberdaya masih tidak memadai.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, sumberdaya masih belum memadai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Sumberdaya, dan Penyelenggaraan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

Name : Risya Aquarta Rompas

NPM : 2012310118

Title : *Analyst of carrying capacity at Dinas Sosial Kota Bandung*

The regulation about social welfare is written in Bandung are stated under Local Government Ordinance No. 24 of 2012. Social welfare is a condition where material, spiritual and citizen needs are fulfilled to implement their social functions. The management of social welfare is a set of activities including social rehabilitation, social insurance, social empowerment, and social protection. Still encountered a number of constraints related to the availability of Resources at Dinas Sosial Kota Bandung

The objective of this research is to describe resource carrying capacity reviewed from staff aspect, authority, information, and facility for The implementation of Local Government Ordinance No. 24 of 2012 Regarding Social Welfare Management and Handling. This research is done to obtain the fact in reality that resources are not satisfied yet.

According by the type, this research is included as descriptive research with the data obtain by interview, observation and document study. The data obtained is analyzed by phenomenology qualitative research method.

This research result shows that Social Service (Dinas Sosial) of Bandung City in managing and handling social welfare, resources are not astisfied yet as correspond to Local Government Ordinance No. 24 of 2012 About Management and Handling Social Welfare.

Keyword: Public Policy, Implementation, Resources, and Management Handling Social Welfare.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung”. Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan tentunya dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis terkait dengan administrasi publik di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada penulis, kepada kedua orang tua saya Rudi Makino Rompas dan Isnayuni, serta adik saya Yazid Qhossy Rompas yang menjadi motivasi terbesar kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan kasih sayang tiada henti kepada penulis.. Tak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing

peneliti Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si. yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tutik Rachmawati, S.IP., MA.,Ph.D dan Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Susana Ani, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Bapak Deni M, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Andoko dan jajaran dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Galuh Karsana Y, S. Sos. M.Si, Drs. H. Yogaswara Hedramurti dan segenap narasumber terkait dengan penelitian ini, yang telah memberikan informasi kepada penulis.
4. Thya Dan Suri partner in crime dari kecil yang selalu membuat canda tawa. Selalu menjadi penghibur dan disusahkan oleh penulis.
5. Partner yang selalu memotivasi dan selalu ada Ridho, Caca Cawek, dan Cici hingga titik terendah penulis. Kalian terbaik. See You On Top.
6. Yang selalu menemani Rika, Lidia, Aulia, dan Priska yang tidak bosan mendengar curahan hati penulis serta menyemangati penulis, Tons of luck.
7. Rekan seperjuangan dari bimbel hingga sekarang Ega, Rere, Priska, Prima, Jodi, Eqy, dan Martin.

8. Rekan seperjuangan dalam penulisan ini Disya, Novy, Gilang, Mushaf, Ray, Devi, Chikita, Recky, dan Dila yang selalu memberikan informasi dan semangat selama proses penulisan ini. Dan yang lainnya yang selalu membuat tertawa di kampus dan mau mendengarkan penulis.
9. Teman-teman Administrasi Publik Unpar 2012.
10. Serta semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah salah satu alasan mengapa karya ini bisa diselesaikan hingga ahir waktu yang ditentukan.

Semoga Allah SWT dapat membalas semua jasa pihak-pihak yang selama ini membantu saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bandung, 18 Januari 2017

Penulis,

Risya Aquarta Rompas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kebijakan Publik	8
2.2 Implementasi	10

2.3	Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
2.4	Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)....	12
2.5	Pendekatan Implementasi Kebijakan	14
2.6	Prespektif Implementasi Kebijakan	16
2.7	Fokus Implementasi	17
2.8	Pengertian Sumber Daya.....	21
2.8.1	Staf	23
2.8.2	Informasi	24
2.8.3	Kewenangan	25
2.8.4	Fasilitas	27
2.9	Model Penelitian	28
BAB III		32
METODOLOGI PENELITIAN.....		32
3.1	Rancangan Penelitian	32
3.2	Peran Peneliti	36
3.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.4	Metode Pengumpulan Data	37
3.4.1	Sumber Data	37
3.4.2	Prosedur Pengumpulan Data	39

3.5	Analisis Data	43
3.6	Pengecekan Keabsahan Temuan	45
3.7	Operasionalisasi Variabel	47
BAB IV		53
GAMBARAN UMUM		53
4.1	Profil Dinas Sosial Kota Bandung	53
4.1.1	Visi dan Misi Dinas Sosial	53
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial	57
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial	70
BAB V		74
Analisis Daya Dukung Sumberdaya Di Dinas Sosial Kota Bandung		74
5.1	Sumberdaya	76
5.2	Staf	83
5.2.1	Ukuran	84
5.2.2	Keterampilan	91
5.3	Informasi	101
5.4	Kewenangan	113
5.5	Fasilitas	119
BAB VI		128

KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
6.1 Kesimpulan	128
6.2 Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

TABEL 1.I.1 INDIKASI MASALAH SUMBERDAYA PADA IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDUNG NO. 24 TAHUN 2012.....	3
TABEL 1.I.2 SISTEMATIKA PENULISAN SKRISPSI	7
TABEL 3.III.1 OPERASIONALISASI VARIABEL SUMBERDAYA.....	47
TABEL 4.IV.1 KOMPOSISI PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL.....	73
TABEL 4.IV.2 KOMPOSISI PEGAWAI DINAS SOSIAL BERDASARKAN PENDIDIKAN.....	73
TABEL 5.V.1 JUMLAH STAF SUB-BAGIAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BELUM MEMENUHI KAPASITAS IDEAL	86
TABEL 5.V.2 UPAYA DINAS SOSIAL UNTUK MEMOTIVASI PMKS	92
TABEL 5.V.3 INFORMASI DARI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG MENGENAI PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	103
TABEL 5.V.4 KEWENANGAN YANG DILAKUKAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BERSIFAT FORMAL DAN BENTUK KEWENANGAN YANG DIPEROLEH OLEH STAF	115
TABEL 5.V.5 FASILITAS YANG TERSEDIA DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	120
TABEL 5.6 DAYA DUKUNG SUMBERDAYA DITINJAU DARI ASPEK STAFF, WEWENANG, INFORMASI, DAN FASILITAS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	127

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 MODEL PENELITIAN.....	29
GAMBAR 4.1 STRUKTUR DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG.....	72
GAMBAR 5.1 PENYULUHAN OLEH DINAS SOSIAL.....	97
GAMBAR 5.2 WAWANCARA DENGAN TKSK	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PMKS Di Kota Bandung Tahun 2010-2012

Lampiran 2 Kartu Bimbingan

Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial

Lampiran 4 Panduan Wawancara

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki regulasi mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Di dalam Perda tersebut, yang dimaksud dengan PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Sedangkan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²

¹ Pasal 1 Ayat 26 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 24 Tahun 2012

² Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 24 Tahun 2012

Adapun tujuan Perda Kota Bandung No. 24 Tahun 2012 antara lain adalah³:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, berdasarkan Perda Kota Bandung No. 24 Tahun 2012, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung dinyatakan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan Perda tersebut.⁴ Dalam hal ini, tentunya Dinsos Kota Bandung dituntut untuk mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III

³ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 24 Tahun 2012

⁴ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 24 Tahun 2012

yang menyatakan bahwa sumberdaya merupakan salah satu faktor kurisal yang mendukung Implementasi sebuah Kebijakan. Lebih lanjut diuraikan bahwa sumberdaya yang dimaksud meliputi staff, wewenang, informasi, dan fasilitas.⁵

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung ternyata masih ditemui sejumlah hambatan yang berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung Di Dinas Sosial Kota Bandung. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan gejala masalah dimaksud:

Tabel 1.1
Indikasi Masalah Sumberdaya Di Dinas Sosial Kota Bandung⁶

No.	Aspek Sumberdaya	Gejala Masalah
1	Ukuran Staff	Berdasarkan pengakuan Kepala Sub-Bagian Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung diketahui bahwa jumlah personil yang ada pada Dinsos Kota Bandung berjumlah 58 orang. Beliau menilai bahwa hal ini kurang memadai sebab mereka bertugas untuk mengawasi 30 kecamatan. Estimasi beliau, ukuran staff yang ideal untuk satu kecamatan adalah kurang lebih 50 orang. RW di Kota Bandung yang berjumlah 1561 RW idealnya memerlukan 50 orang staf. Hal ini juga berkaitan dalam penanganan

⁵ George C Edward III. *Implementing Public Policy*. (Washington DC : Congressional Quarterly Press, 1980) Hal 4.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung tanggal 16 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB.

		<p>sedini mungkin untuk mempersiapkan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Staf Rehabilitasi Sosial hanya memiliki tiga orang pegawai. Seksi ini idealnya memiliki minimal satu teknisi untuk tiap-tiap bidang yang berjumlah 22 bidang dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial agar lebih efektif dan efisien.</p>
2	Informasi	<p>Di dalam mematuhi penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial informasi yang didapatkan pada staf yaitu mematuhi Perda no 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. Staf Dinas Sosial memiliki jumlah data PMKS di Kota Bandung dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2012 untuk keseluruhan berjumlah dari 22 jenis PMKS kurang lebih mencapai 110.000 PMKS dan memiliki data titik pemantauan PMKS.</p>
3	Kewenangan	<p>Staf Dinas Sosial Kota Bandung memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pemerintah mengakomodasi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Seperti sub-bagian rehabilitasi sosial mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban.</p>
4	Fasilitas	<p>Dinsos Kota Bandung tidak memiliki fasilitas Panti Rehabilitasi PMKS. Selama ini Panti Rehabilitasi bagi PMKS Kota Bandung masih menumpang di Panti milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu Dinsos tidak memiliki pusat usaha adapun yang diberikan keterampilan berusaha dalam kegiatan pelatihan. Jadi pada saat ini hanya pelatihan usaha saja. Untuk tempatnya masih belum punya.</p>

	<p>Pada Perda Kota Bandung No 24 Tahun 2012 Pasal 36 Ayat 2 menyatakan bahwa penertiban dilakukan oleh Dinas Sosial yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan. Sedangkan di lapangan, dalam upaya penertiban, Dinsos memerlukan transportasi agar lebih efisien. Transportasi yang dimiliki Dinsos untuk penertiban hanya satu truk, sehingga tidak memadai dikarenakan tidak bisa mengangkut orang banyak. Satu truk mengangkut sekitar 25 orang PMKS, sedangkan rata-rata jumlah PMKS per-satu penertiban sekitar 70 orang. Dan luas wilayah yang tidak berbanding dengan transportasi yang dimiliki. Idealnya Dinsos memiliki 1 truk untuk 1 kecamatan.⁷</p>
--	--

Adanya penelitian yang dilakukan terhadap masalah ini diharapkan dapat memberi solusi bagi pemerintah Kota Bandung di dalam penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti dengan judul ***“Analisis Daya Dukung Sumber Daya Di Dinas Sosial Kota Bandung”***

⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-Bagian Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung tanggal 1 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah:

Bagaimana daya dukung sumberdaya ditinjau dari aspek staff, wewenang, informasi, dan fasilitas terhadap sumber daya di Dinas Sosial Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan daya dukung sumberdaya ditinjau dari aspek staff, wewenang, informasi, dan fasilitas terhadap Sumberdaya Di Dinas Sosial Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada Dinas Sosial Kota Bandung mengenai daya ukuran sumberdaya terhadap Sumberdaya di Dinas Sosial Kota Bandung ditinjau dari aspek staff, wewenang, informasi dan fasilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disajikan dalam enam buah Bab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sistematika Penulisan Skripsi

Bab	Judul Bab	Deskripsi Isi Bab
Bab 1	Pendahuluan	Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
Bab 2	Tinjauan Pustaka	Bab ini menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan Teori Edward III yang berfokus pada sumberdaya.
Bab 3	Metode Penelitian	Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan operasionalisasi variabel.
Bab 4	Gambaran Umum	Bab ini menjelaskan mengenai Profil Dinas Sosial Kota Bandung, Profil Dinas Sosial Kota Bandung.
Bab 5	Analisis dan Interpretasi Data	Bab ini menjelaskan mengenai analisis data berdasarkan Teori Edward III berfokus pada sumberdaya yang ditinjau dari aspek staff, wewenang, informasi dan fasilitas pada Dinas Sosial Kota Bandung. Selain itu, peneliti juga menginterpretasikan data yang sudah dianalisis.
Bab 6	Kesimpulan dan Saran	Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan rekomendasi saran untuk peningkatan daya dukung sumberdaya terhadap Implementasi Perda Kota Bandung No. 24 Tahun 2012.